

Analisis pengendalian internal piutang dalam mengurangi risiko piutang tak tertagih

Dady Nurpadi¹, Putri Dewi Oktaviani Ashari²

¹Universitas Koperasi Indonesia

¹dady_nur@yahoo.com, ²putriashari@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Agustus 2025

Disetujui 8 September 2025

Diterbitkan 30 September 2025

Kata kunci:

COSO; Pengendalian Internal;
Piutang Tak Tertagih; Risiko
Piutang.

Keywords:

COSO; Internal Control;
Uncollectible Accounts; Credit
Risk.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat kertas kerja mengenai sistem Pengendalian internal atas piutang dengan menggunakan komponen COSO pada Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut, sehingga upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk meminimalkan piutang tak tertagih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka penelitian yang kemudian dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil kertas kerja COSO, penerapan sistem pengendalian internal piutang di Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut menunjukkan persentase 47% dan tergolong kategori High, yang berarti belum optimal dan masih memiliki risiko tinggi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain keterbatasan kompetensi pengurus (komponen lingkungan pengendalian), belum kuatnya analisis risiko sebelum pinjaman diberikan (pertimbangan risiko), serta kurangnya pemahaman pencatatan dan koordinasi data kewajiban anggota kepada pihak ketiga (informasi dan komunikasi). Meski kegiatan pengendalian sudah berjalan efektif, konsistensinya tetap perlu dijaga. Adapun pada komponen monitoring, koperasi belum memiliki sistem atau tim khusus untuk pengawasan piutang secara berkala.

ABSTRACT

The purpose of this study is to produce a working paper on the internal control system for accounts receivable using COSO components at the Dr. Slamet Garut Regional General Hospital Employee Cooperative, thereby identifying the measures that need to be taken to minimize uncollectible accounts receivable. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, through a process of observation, interviews, documentation, and literature study, which is then analyzed and conclusions can be drawn. Based on the results of the COSO working paper, the implementation of the internal control system for accounts receivable at the Dr. Slamet Garut Hospital Employee Cooperative showed a percentage of 47% and was classified as High, which means that it is not yet optimal and still has a high risk. Several contributing factors include the limited competence of the management (control environment component), the lack of a robust risk analysis before loans are granted (risk considerations), and a lack of understanding of the recording and coordination of member obligations to third parties (information and communication). Although control activities are already running effectively, consistency still needs to be maintained. As for the monitoring component, the cooperative does not yet have a specific system or team for regular monitoring of receivables.



©2025 Dady Nurpadi, Putri Dewi Oktaviani Ashari. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kemakmuran suatu negara dapat tercermin dari sistem ekonominya yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan." Salah satu bentuk nyata dari sistem ekonomi berbasis kekeluargaan adalah koperasi.

Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan (Undang-Undang, 1992).

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat 131.617 unit koperasi aktif di Indonesia (Kemenkop & UKM RI, 2024), dengan rincian: koperasi konsumen (52,91%), produsen (21,44%), simpan pinjam (14,49%), jasa (7,67%), dan pemasaran (3,49%). Dari data tersebut, koperasi simpan pinjam menempati posisi ketiga terbanyak, yaitu sebanyak 19.067 unit. Koperasi jenis ini memiliki peranan penting dalam mendukung akses keuangan masyarakat, khususnya dengan menawarkan pinjaman berbunga rendah. Menurut Rudianto (2010) koperasi simpan pinjam bertujuan mengumpulkan dana dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, koperasi simpan pinjam sering menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait piutang bermasalah. Kondisi ini dapat memengaruhi likuiditas koperasi serta perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU). Mengingat sebagian besar aset koperasi simpan pinjam berupa piutang, maka risiko kredit menjadi sangat tinggi apabila pengendalian internal tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang baik guna meminimalkan risiko piutang tak tertagih dan menjaga keberlangsungan usaha koperasi secara sehat dan berkelanjutan.

Menurut Gary (dalam Istanti et al., 2024) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi piutang, koperasi dapat menggunakan metode sistem pengendalian internal piutang agar koperasi dapat memelihara aset dan memberikan informasi yang akurat pada pihak yang berkepentingan. Sistem pengendalian internal mempunyai tujuan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi, serta untuk mendorong dipatuhinya kebijakan.

Adanya sistem pengendalian internal pada piutang bermaksud untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan (Sanapati, 2022), maka dari hal tersebut penerapan sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap pengelolaan piutang di koperasi. Koperasi dapat menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif jika koperasi melakukan: struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan karyawan yang berkompeten dalam sistem pengendalian internal dengan baik kemudian dilanjutkan dalam bidang pengendalian piutang seperti pemberian kredit. Kebijakan pemberian kredit harus dilakukan secara sehat dengan melihat kondisi keuangan yang ada pada koperasi dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya piutang yang berlebihan.

Koperasi Pegawai RSU Dr. Slamet Garut dengan badan hukum No.3297/BH/KWK.10/1/1961 yang berada di Jalan Rumah Sakit No.12 Garut merupakan koperasi yang melakukan beberapa kegiatan usaha nya di antaranya Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Jasa dan Perdagangan, dan Unit Usaha Kantin Kopeg. Aktivitas usaha yang paling menonjol pada Koperasi Pegawai RSU dr.Slamet Garut yaitu unit usaha simpan pinjam. Dengan hal tersebut koperasi memberikan pinjaman kepada anggotanya sehingga menimbulkan piutang sehingga memiliki risiko kredit macet, risiko tingkat bunga, dan terhambatnya aktivitas operasional.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (LPJ) 5 tahun ke belakang terdapat peningkatan piutang tak tertagih secara signifikan dari tahun ke tahun, meskipun jumlah piutang total mengalami penurunan. Pada tahun 2019, total piutang tercatat sebesar Rp16.029.861.953 dengan jumlah piutang tak tertagih sebesar Rp998.339.414 atau setara dengan 6,2% dari total piutang. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan drastis piutang tak tertagih menjadi Rp5.354.722.978, yaitu 35% dari total piutang. Kondisi ini semakin memburuk pada tahun 2021 hingga 2023, di mana jumlah piutang tak tertagih terus bertahan pada angka Rp5.377.822.999, meskipun total piutang menurun dari Rp14.667.729.043 (2021) menjadi Rp13.825.866.643 (2023).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa persentase piutang tak tertagih mengalami peningkatan, dari 36,7% pada 2021, naik menjadi 38,1% di 2022, dan mencapai 38,9% pada 2023. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun jumlah pinjaman dan peminjam bertambah setiap tahun, efektivitas penagihan dan pengendalian piutang belum berjalan optimal. Kenaikan pada persentase piutang tak tertagih terhadap total piutang menjelaskan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya pada proses seleksi pemberian pinjaman, pemantauan pembayaran, dan penagihan yang tidak maksimal. Akumulasi piutang tak tertagih yang tidak berubah dalam tiga tahun terakhir juga menunjukkan tidak adanya tindak lanjut atau kebijakan penyelesaian kredit macet, sehingga risiko keuangan koperasi semakin tinggi. Maka dengan adanya penjelasan tersebut, sistem pengendalian

internal piutang belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengendalian piutang sangat diperlukan agar kinerja keuangan koperasi tetap sehat dan berkelanjutan.

Menurut *The committee of sponsoring organizations of the Treadway Commission* (COSO) (dalam McNally, 2013) mendefinisikan bahwa “Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.” Sedangkan penerapan di dalam koperasi dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh pengawas, pengurus dan anggota, yang disusun untuk memberikan kepastian mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Di dalam COSO terdapat juga lima komponen yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan monitoring.

Sistem pengendalian internal piutang pada Koperasi Pegawai RSUD Slamet Garut masih sangat sederhana dan masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Mulai dari prosedur dalam pemberian pinjaman kepada anggota tidak dilihat dari kemampuan bayar anggota, anggota meminjam kepada pihak bank tanpa diketahui oleh koperasi sehingga pemotongan gaji tidak terlaksanakan, tidak adanya limit yang boleh dipinjamkan oleh anggota kepada koperasi, tidak adanya pemantauan secara khusus yang dilakukan oleh koperasi terkait piutang dan koperasi mengalami kesulitan dalam penagihan piutang karena sebagian anggota yang memiliki piutang dengan jumlah nominal yang besar sudah mutasi pindah pekerjaan atau sudah meninggal dunia.

Permasalahan piutang tak tertagih masih menjadi tantangan signifikan bagi koperasi simpan pinjam, termasuk Koperasi Pegawai RSUD dr. Slamet Garut. Pendekatan pengendalian internal yang kurang optimal dapat memicu peningkatan risiko kerugian, terutama ketika komponen pengawasan dan evaluasi belum berjalan efektif. Untuk menilai sistem pengendalian yang ada, penelitian ini menggunakan pendekatan lima komponen COSO, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil observasi menunjukkan berbagai kelemahan pada masing-masing komponen, seperti tidak adanya limit pinjaman (*control environment*), ketiadaan analisis risiko anggota (*risk assessment*), rangkap jabatan dalam pengelolaan piutang (*control activities*), kurangnya transparansi informasi anggota (*information & communication*), serta belum adanya daftar khusus anggota berisiko tinggi (*monitoring*).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas sistem pengendalian internal piutang berbasis kerangka COSO. Agha & Fitria (2024) menunjukkan bahwa koperasi KSP JRX telah menerapkan prosedur yang cukup efektif, terutama pada komponen lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Istanti et al. (2024) juga menilai bahwa sistem pengendalian internal pada koperasi Kredit Union Bahtera Sejahtera telah berjalan dengan baik, terutama pada komponen lingkungan pengendalian, komunikasi, dan aktivitas pengendalian, namun monitoring dinilai masih kurang maksimal. Temuan serupa juga disampaikan oleh Sigar et al. (2018) dan Singal & Z.Tirayoh (2015), yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal piutang di lembaga keuangan telah berjalan efektif, namun tetap membutuhkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan risiko baru.

Sebaliknya, beberapa studi menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal yang berdampak pada meningkatnya piutang bermasalah. Lara (2021) mengungkapkan bahwa lemahnya tanggung jawab tim pemasaran dan pengawasan administrasi menyebabkan piutang tak tertagih di PT Bestari Buana Murni. Taroreh et al. (2016) menemukan bahwa meskipun sistem pengendalian internal di PT Mandiri Tunas Finance sudah cukup baik dan mengacu pada prinsip COSO, masih diperlukan perbaikan di beberapa komponen tertentu. Sementara itu, Naibaho et al. (2019) menilai bahwa pengendalian piutang di koperasi belum berjalan efektif karena terbatasnya metode penagihan serta lemahnya pengawasan terhadap perjanjian awal pinjaman dan syarat pemberian kredit.

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi di Koperasi Pegawai RSUD dr. Slamet Garut serta mengacu pada pendekatan sistem pengendalian internal berbasis kerangka COSO, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengendalian internal atas piutang, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya piutang tak tertagih, mengkaji implementasi kelima komponen

COSO dalam operasional koperasi simpan pinjam, serta merumuskan strategi atau upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko piutang bermasalah di lingkungan koperasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem pengendalian piutang pada koperasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut, yaitu Pengawas, Ketua, Bendahara, Manajer, dan bagian keuangan, serta dilakukan konfirmasi kepada anggota yang masih memiliki tunggakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen internal koperasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori sistem pengendalian internal berbasis kerangka COSO. Proses analisis mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

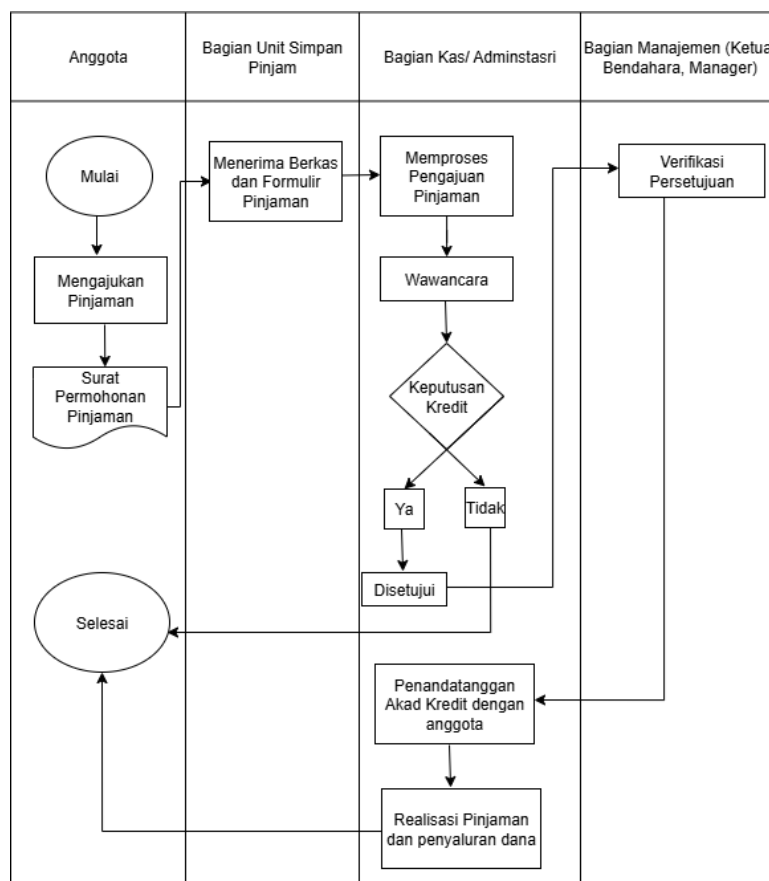
Penerapan Pengendalian Internal Atas Piutang dan Kesesuaiannya Dengan Konsep Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan Kertas Kerja COSO

Pada penelitian ini peneliti memiliki 2 indikator. Pertama, mengetahui mengenai pengendalian internal dalam prosedur pemberian pinjaman, hal tersebut mengacu pada teori Kasmir yang terdiri dari 8 prosedur pemberian pinjamankredit. Prosedur ini akan digunakan sebagai acuan untuk melihat kesesuaian prosedur pemberian pinjaman di Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut dengan prosedur yang telah diterapkan. Sementara itu, indikator kedua yaitu penerapan pengendalian internal atas piutang pada Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut berdasarkan kertas kerja COSO.

1. Prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut.

Berdasarkan hasil wawancara terkait prosedur pemberian pinjaman yang ada di Koperasi RSU dr Slamet Garut menunjukan bahwasannya prosedur pemberian pinjaman kepada anggota hanya menerapkan tujuh prosedur mulai dari pengajuan berkas hingga penyaluran dana. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi belum sepenuhnya menjalankan prosedur sesuai dengan teori Kasmir, yang mengatakan bahwa pemeriksaan ke lapangan atau *on the spot* penting dilakukan pemberian kredit. Ketidakterlaksanaan pemeriksaan ke lapangan ini menjadi salah satu kelemahan dalam sistem pengendalian internal koperasi, khususnya pada komponen penilaian risiko dan monitoring.

Dengan melihat prosedur pemberian pinjaman yang telah dijalankan oleh Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut, penting untuk memahami alur proses tersebut secara lebih terstruktur. Hal tersebut digunakan untuk memperjelas tahapan dari pengajuan hingga pembayaran pinjaman. Gambar 1 menyajikan *flowchart* yang menggambarkan alur proses pengajuan pinjaman dan pembayaran pinjaman Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut.

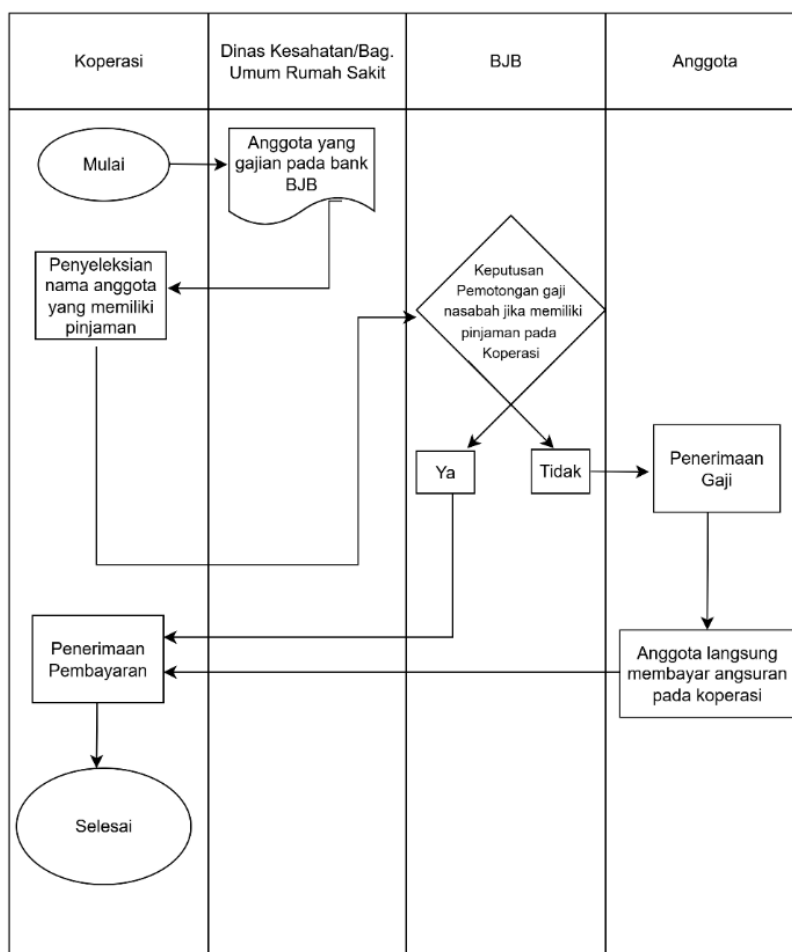


Gambar 1. Flowchart Prosedur Pemberian Pinjaman
 Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

Pada flowchart prosedur pemberian pinjaman menggambarkan urutan proses dari mulai pengajuan dokumen oleh anggota hingga pencairan dana. Pada setiap tahapannya dilaksanakan oleh unit yang berbeda, mulai dari anggota yang mengajukan pinjaman dengan mengisi formulir surat permohonan pinjaman, bagian unit usaha simpan pinjaman yang memfasilitasi dengan menerima semua persyaratan anggota untuk meminjam kepada koperasi, lalu bagian kas/administrasi yang memproses pengajuan pinjaman dengan melakukan wawancara untuk analisis terhadap permohonan tersebut untuk menentukan apakah akan disetujui atau ditolak, jika permohonan ditolak atau dipertimbangkan, anggota akan diberitahu alasannya. Namun jika permohonan disetujui. Selanjutnya bagian manajemen koperasi (Ketua, Bendahara dan Manager) akan melakukan verifikasi persetujuan pinjaman. Setelah semua persyaratan anggota akan diberitahu oleh bagian kas/administrasi untuk penandatanganan akad kredit, setelah persyaratan terpenuhi anggota dapat mengambil uang pinjaman dikoperasi.

Meskipun sistem sudah berjalan dengan baik, terdapat kekurangan penting yaitu tidak adanya pemeriksaan lapangan terhadap kondisi anggota, yang seharusnya menjadi bagian dari uji kelayakan risiko pinjaman sesuai dengan komponen penilaian risiko dalam komponen COSO. Hal tersebut menjelaskan bahwa potensi risiko kredit hanya didasarkan pada dokumen, bukan pada survey atau verifikasi eksternal.

Setelah proses pengajuan pinjaman dinyatakan disetujui dan dana dicairkan, tahapan selanjutnya masuk ke dalam proses pembayaran pinjaman. Flowchart pembayaran pinjaman menggambarkan mekanisme pengembalian pinjaman oleh anggota, baik melalui sistem potong gaji otomatis dari Bank BJB maupun melalui pembayaran langsung ke koperasi, yang keduanya memiliki pengaturan dan risiko pengendalian yang berbeda. Berikut flowchart alur pembayaran pinjaman yaitu:



Gambar 2. Flowchart Pembayaran pinjaman

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

Flowchart pembayaran pinjaman menggambarkan alur proses pengembalian pinjaman oleh anggota koperasi setelah dana pinjaman telah dicairkan. Pada Koperasi Pegawai RSUD Slamet Garut, terdapat dua mekanisme utama dalam proses pembayaran pinjaman. Pertama melalui sistem potong gaji otomatis yang dilakukan oleh Bank BJB. Pada proses ini, data pegawai atau anggota koperasi yang menerima gaji melalui BJB dikumpulkan oleh bagian umum rumah sakit dan diverifikasi oleh koperasi. Selanjutnya, koperasi mengirimkan daftar nama – nama anggota yang memiliki pinjaman ke pihak BJB. Bank BJB kemudian melakukan pemotongan langsung dari gaji bulanan anggota sesuai jumlah angsuran, dan sisa gaji yang telah dipotong disalurkan kepada anggota. Pada proses ini memberikan keunggulan dalam aspek pengendalian interna karena menjamin kelancaran pembayaran dan meminimalkan risiko keterlamabatan pembayaran angsuran.

Proses kedua, untuk anggota yang tidak menerima gaji melalui BJB atau memilih pembayaran langsung, pembayaran dilakukan langsung oleh anggota kepada koperasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Namun pada proses ini menuntut koperasi untuk memiliki sistem monitoring yang kuat untuk memastikan kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, potensi terjadinya piutang tak tertagih akan meningkat. Oleh karena itu, sistem pengendalian dan pelaporang terhadap anggota dengan pembayaran manual perlu ditingkatkan agar risiko dapat ditekan secara optimal.

2. Penerapan pengendalian internal atas piutang yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSU dr. Slamet Garut berdasarkan kertas kerja COSO

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan dengan pendekatan yang digunakan oleh Hafilah dalam jurnalnya, dimana tingkat efisiensi sistem pengendalian internal diukur melalui evaluasi atas komponen – komponen yang telah terpenuhi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ESPI = \frac{\text{Jumlah unsur SPI}}{\text{Total Unsur SPI}} \times 100\%$$

Maka hasil dari yang didapatkan oleh Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut yaitu:

Tabel 1. Penilain Kertas Kerja COSO

Komponen	Total Unsur SPI	Jumlah Unsur SPI	Persentase (%)	Kategori
Lingkungan Pengendalian Internal	6	2	33	High
Pertimbangan risiko	3	2	67	Medium
kegiatan pengendalian	5	5	100	Low
informasi dan komunikasi	3	0	0	High
Monitoring	3	1	33	High
Rata – rata			47	High

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap lima komponen, terlihat bahwa beberapa komponen masih menunjukkan kategori risiko tinggi. Untuk memperdalam pembahasan tersebut, dilakukan penilaian risiko lanjutan melalui risiko komposit. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi risiko dari setiap komponen, sekaligus merancang mitigasi yang tepat agar pengendalian internal koperasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Berikut tabel penilaian risiko komposit beserta mitigasi risiko yang diusulkan.

Tabel 2. Penilain Risiko Komposit

Komponen	Risiko Inheren	Risiko Komposit	Mitigasi Risiko
Lingkungan Pengendalian Internal	<i>High</i>	<i>Weak</i>	Melakukan dokumentasi kode etik, pelatihan rutin koperasi dan akuntansi, evaluasi bulanan bersama pengawas, memperbarui struktur organisasi dan uraian tugas, serta menetapkan batasan wewenang secara tertulis.
Pertimbangan Risiko	<i>Medium</i>	<i>Acceptable</i>	Buat daftar risiko piutang dan diperbarui setiap triwulan, Membuat from analisis risiko pinjaman per anggota sebelum disetujui dan Kembangkan SOP penagihan dan pencegahan risiko
Kegiatan Pengendalian	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	Menyusun daftar risiko piutang triwulanan, membuat form analisis risiko per anggota sebelum persetujuan, dan mengembangkan SOP penagihan serta pencegahan risiko secara menyeluruh.
Informasi Dan Komunikasi	<i>High</i>	<i>Weak</i>	Menggunakan software akuntansi seperti Accurate disertai pelatihan, menambahkan form pernyataan utang luar koperasi saat pengajuan, serta membuat sistem notifikasi tagihan bulanan melalui WhatsApp atau email.
Monitoring	<i>High</i>	<i>Weak</i>	Membuat checklist evaluasi bulanan dengan melibatkan bendahara dan pengawas, menyusun laporan evaluasi triwulanan, serta memperbarui daftar piutang bermasalah setiap bulan untuk ditindaklanjuti.

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan ESPI dan penilaian risiko komposit terhadap lima komponen COSO dalam sistem pengendalian internal koperasi, serta mempertimbangkan mitigasi yang telah

direncanakan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengendalian internal pada masing – masing komponen masih bervariasi. Adapun penjelasan mengenai setiap komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Internal (33%)

Pada komponen lingkungan pengendalian internal mendapatkan persentase sebesar 33% yang termasuk kategori High, yang menunjukkan bahwa komponen ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kelemahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kompetensi pengurus yang berasal dari latar belakang non-akuntansi dan non-koperasi, serta belum adanya struktur organisasi yang jelas, termasuk dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab. Maka dengan adanya kelemahan tersebut mitigasi yang telah dipertimbangkan yaitu, Melakukan dokumentasi kode etik, pelatihan rutin koperasi dan akuntansi, evaluasi bulanan bersama pengawas, memperbarui struktur organisasi dan uraian tugas, serta menetapkan batasan wewenang secara tertulis.

2. Pertimbangan Risiko (67%)

Pada komponen pertimbangan risiko mendapatkan persentase sebesar 67% yang termasuk kategori Medium, yang mengartikan bahwa pengelolaan risiko sudah cukup diterapkan namun masih membutuhkan penguatan untuk menekan potensi kerugian dengan cara analisis risiko sebelum memberikan pinjaman kepada anggota sebagai salah satu cara dan koperasi perlu membuat mitigasi risiko dengan membuat daftar risiko piutang dan diperbarui setiap triwulan, Membuat form analisis risiko pinjaman per anggota sebelum disetujui dan Kembangkan SOP penagihan dan pencegahan risiko.

3. Kegiatan Pengendalian (100%)

Pada komponen kegiatan pengendalian mendapatkan persentase sebesar 100% yang termasuk kategori Low, yang mengartikan bahwa SPI pada komponen ini sudah berfungsi efektif dalam mencegah kesalahan dan penyimpangan. Namun, pada komponen ini perlu dipertahankan konsistensinya dengan menyiapkan beberapa langkah mitigasi yang dapat menyempurnakan penerapannya, yaitu menyusun daftar risiko piutang triwulanan, membuat form analisis risiko per anggota sebelum persetujuan, dan mengembangkan SOP penagihan serta pencegahan risiko secara menyeluruh.

4. Informasi dan Komunikasi (0%)

Pada komponen informasi dan komunikasi mendapatkan persentase sebesar 0% yang termasuk kategori High, yang menunjukkan bahwa komponen ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kelemahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya kekurangan pemahaman terhadap pencatatan dari kepengurusan sebelumnya, serta kurangnya koordinasi dan ketersediaan data yang memadai untuk mengetahui bahwa kewajiban anggota kepada pihak ke tiga. Pada komponen ini, mitigasi sangat diperlukan mengingat masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain menggunakan software akuntansi seperti Accurate disertai pelatihan, menambahkan form pernyataan utang luar koperasi saat pengajuan, serta membuat sistem notifikasi tagihan bulanan melalui WhatsApp atau email.

5. *Monitoring* (33%)

Pada komponen monitoring mendapatkan persentase sebesar 33% yang termasuk kategori High, yang menunjukkan bahwa komponen ini memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kelemahan tersebut yaitu karena monitoring terhadap piutang bermasalah belum berjalan efektif. Berdasarkan wawancara, koperasi belum memiliki sistem atau tim khusus yang melakukan pengawasan internal secara berkala terhadap piutang macet, melainkan hanya berdasarkan laporan tahunan. Kelemahan yang dimiliki tersebut mengartikan bahwa perlunya perbaikan adapun mitigasi yang dipertimbangkan yaitu, membuat checklist evaluasi bulanan dengan melibatkan bendahara dan pengawas, menyusun laporan evaluasi triwulanan, serta memperbarui daftar piutang bermasalah setiap bulan untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan rata – rata yang didapatkan, mengenai penerapan sistem pengendalian internal piutang pada Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet Garut menunjukkan persentase 47% yang termasuk kategori High. Hal tersebut mengartikan bahwa secara umum, sistem pengendalian internal belum

diterapkan secara maksimal dan masih memiliki potensi risiko yang relative tinggi. Pada penilaian risiko komposit yang sudah diberikan mitigasi, diketahui bahwa sebagai besar komponen seperti lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring tergolong dalam kategori risiko tinggi dengan komposit lemah (*weak*). Hal tersebut menunjukkan bahwa mitigasi yang diterapkan merupakan langkah perbaikan pada sistem pengendalian internal koperasi. Sementara itu, pada kegiatan pengendalian yang menunjukkan risiko rendah dan dinilai memiliki pengendalian yang kuat, namun hal tersebut perlu dijaga konsistensinya dengan menyiapkan beberapa langkah mitigasi yang dapat menyempurnakan penerapannya.

Dengan Kondisi ini menegaskan bahwa koperasi perlu melakukan langkah-langkah pasti dalam memperbaiki kelemahan tiap komponen, melalui pelatihan rutin, pembaruan struktur organisasi, penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, penyusunan SOP penagihan yang sistematis, serta evaluasi berkala terhadap daftar piutang bermasalah. Penerapan mitigasi secara konsisten dan menyeluruh pada masing-masing komponen COSO, diharapkan sistem pengendalian internal koperasi dapat berjalan lebih efektif dan risiko piutang tak tertagih dapat diminimalkan secara signifikan.

Penyebab faktor piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut

Piutang tak tertagih merupakan faktor utama dalam kegiatan operasional pada unit koperasi simpan pinjam. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut, ditemukan bahwa piutang tak tertagih yang terjadi pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut terjadi akibat beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori yang disampaikan oleh Rivai. Adapun faktor internal dan eksternal yang menyebabkan piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut berdasarkan hasil temuan yang telah dikemukakan pada kertas kerja COSO.

Pada komponen COSO yang menyebabkan faktor terjadinya piutang tak tertagih yaitu komponen lingkungan pengendalian dengan risiko 33% kategori high dan komponen informasi & komunikasi dengan skor 0% kategori high yaitu pemberian pinjaman yang terlalu longgar, kelonggaran peraturan dimasa lalu, tidak adanya standar kekayaan yang jelas serta lemahnya deteksi keuangan. Hal tersebut merupakan faktor internal yang terjadi di Koperasi Pegawai RSU dr Slamet Garut, dengan rendahnya skor pada kedua komponen ini mencerminkan kurangnya prosedur formal, sistem informasi akuntansi, dan koordinasi yang efektif, sehingga proses analisis risiko sebelum pemberian pinjaman kurang optimal. Selain itu, adanya keterbatasan jumlah staf piutang juga berhubungan dengan rendahnya efektivitas pada komponen monitoring dengan risiko 33% kategori high, hal tersebut berpengaruh karena seharusnya proses pemantauan arus kas anggota dilakukan secara berkala.

Sedangkan untuk komponen pertimbangan risiko mendapatkan skor 67% dengan kategori medium, walaupun memang skor kategori risiko sedang tetapi penurunan kondisi ekonomi, kegagalan usaha, masalah keluarga, bencana alam dan watak buruk anggota sangat berdampak terhadap ketidakpastian koperasi dalam mengantisipasi risiko eksternal menunjukkan perlu adanya penguatan analisis risiko, identifikasi risiko dan mitigasi risiko.

Sementara itu, pada komponen kegiatan pengendalian dengan skor 100% dengan kategori low risk memang sudah berfungsi baik, tetapi jika pada komponen lingkungan pengendalian, informasi & komunikasi, dan monitoring belum optimal dalam mencegah piutang bermasalah menjadi terbatas. Maka dengan demikian, faktor – faktor yang terjadi dan ditemukan selaras dengan skor rata – rata COSO sebesar 47% kategori *High*, yang mengartikan bahwa sistem pengendalian internal koperasi masih berisiko tinggi dan memerlukan perbaikan khususnya pada komponen lingkungan pengendalian, informasi & komunikasi, serta monitoring agar risiko piutang tak tertagih dapat diminimalkan.

Implementasi sistem pengendalian internal menurut teori COSO di dalam unit koperasi simpan pinjam

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana implementasi sistem pengendalian internal menurut teori COSO di dalam unit koperasi simpan pinjam. Hasil implementasi sistem pengendalian internal yang dituangkan ke dalam kertas kerja berdasarkan lima komponen COSO, dapat dilihat bahwa koperasi telah mulai menerapkan sebagian prinsip-prinsip pengendalian internal. Namun, penerapannya belum optimal dan masih terdapat kelemahan pada beberapa komponen.

1. Lingkungan Pengendalian Internal

Lingkungan pengendalian internal merupakan fondasi awal terhadap nilai – nilai organisasi serta komitmen manajemen terhadap pengendalian. Berdasarkan data komponen ini memperoleh skor rendah, yaitu 33% hal ini bahwa lingkungan pengendalian masih tergolong memiliki risiko yang tinggi. Hal yang mempengaruhi yaitu kurangnya kompetensi pengurus, struktur organisasi yang tidak jelas, dan kurangnya pembagian wewenang yang terstruktur.

2. Pertimbangan Risiko

Pertimbangan risiko berfungsi memiliki fungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko hal tersebut bisa saja mempengaruhi tujuan koperasi khususnya pada piutang. Berdasarkan data komponen ini memperoleh skor 67% dengan kategori medium, pada komponen ini koperasi mulai memahami pentingnya proses tersebut, tetapi pada kenyataan di lapangan masih ada beberapa aspek yang belum maksimal sehingga ada beberapa kelemahan seperti tidak adanya analisis risiko secara menyeluruh sebelum memberi pinjaman dan koperasi tidak memiliki akses terhadap informasi kewajiban anggota di luar koperasi yang bisa menyebabkan risiko gagal bayar.

3. Kegiatan Pengendalian

Pada komponen kegiatan pengendalian memiliki persentase paling tinggi yaitu 100% dengan kategori low yang berarti pada komponen ini sudah di implementasikan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara operasional koperasi sudah menjalankan prinsip – prinsip pengendalian dalam pelaksanaan tugas harian.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen informasi dan komunikasi merupakan komponen yang berkaitan bagaimana suatu perusahaan atau koperasi mengelola dan menyebar informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif dalam mendukung sistem pengendalian. Pada komponen mendapatkan persentase 0% dengan kategori High dan risiko yang tinggi, kelemahan yang ditemukan yaitu belum adanya sistem informasi akuntansi yang memadai dalam memantau piutang secara real-time dan laporan piutang kepada anggota tidak diberikan secara berkala kecuali diminta.

5. Monitoring

Monitoring merupakan suatu proses berkelanjutan untuk menilai kualitas kinerja sistem pengendalian internal dari waktu ke waktu. Koperasi Pegawai RSUD Slamet mendapatkan persentase 33% dengan kategori high yang berarti fungsi ini belum berjalan secara maksimal, seperti tidak adanya pelaporan atau pengawasan internal terhadap piutang bermasalah dan evaluasi dilakukan oleh manager, sedangkan pengawas atau pengurus kurang terlibat secara aktif.

Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen COSO dapat diterapkan dalam unit koperasi simpan pinjam, termasuk di Koperasi Pegawai RSUD Slamet Garut. Dengan catatan adanya penyesuaian dan perbaikan dalam komponen lingkungan pengendalian internal terkait sumber daya manusia serta komponen informasi dan komunikasi terkait sistem administrasi dan koordinasi kepada anggota. Jika seluruh komponen telah diterapkan maka akan membantu koperasi dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan mengurangi risiko piutang yang bermasalah atau tidak tertagih.

Upaya-upaya dalam meminimalkan piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet Garut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet Garut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemberian pinjaman yang terlalu longgar, dan lemahnya pemantauan terhadap piutang. Selain itu adanya masalah pribadi anggota, kegagalan usaha, dana kejadian tak terduga. Dengan adanya permasalahan tersebut cara mengatasinya yaitu diperlukan penguatan sistem pengendalian internal yang tidak hanya mengandalkan tindakan hukum sebagai mitigasi, tetapi juga melakukan langkah preventif dan korektif yang startegis.

Adapun pendekatan preventif yang telah dituangkan dalam rencana tindak lanjut yang dapat digunakan oleh Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet Garut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Tindak Lanjut

Komponen	Prinsip	Penilaian	Mitigasi	Rencana Tindak Lanjut
Lingkungan Pengendalian Internal 33% (<i>High</i>)	Integritas dan nilai-nilai etis	Ya	Membuat dokumentasi tertulis mengenai kode etik di ruang koperasi	Membuat kode etik dan ditandatangani oleh pengurus dan anggota baru setiap tahunnya. Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka pendek)
	Komitmen atau kompetensi	Tidak	Membuat pelatihan secara rutin terkait manajemen koperasi dan akuntansi dasar minimal 1 kali dalam setahun untuk pengurus dan pengawas	Menambah sesi pendampingan internal setiap 3 bulan khususnya pada studi kasus piutang bermasalah. Estimasi waktu: 3 bulan (Jangka pendek)
	partisipasi audit dan komite dewan pengawas	Tidak	Bentuk jadwal evaluasi bulanan yang melibatkan pengawas dan hadir dalam rapat pengelolaan piutang	Membuat dashboard terkait monitoring online untuk pengawas agar bisa memantau progress piutang secara real-time. Estimasi waktu: 4 bulan (Jangka menengah)
	falsafah manajemen dan gaya operasi	Ya	Mempertahankan pelaksanaan tersebut dan dokumentasikan dalam laporan bulanan	Melakukan audit terhadap pembukuan piutang dan kartu piutang untuk menguji kesesuaian dengan catatan transaksi. Estimasi waktu: 6 bulan sekali (Jangka Menengah)
	struktur organisasi	Tidak	Perbaharui struktur organisasi tertulis dan buat uraian tugas pada masing masing posisi	Membuat <i>job description detail</i> untuk setiap posisi & mengunggahnya di papan informasi koperasi. Estimasi waktu: 1 bulan (Jangka pendek)
	metode dan pemberian wewenang	Tidak	Tetapkan Batasan wewenang tertulis untuk persetujuan, pencatatan dan pelaporan.	Membuat sistem persetujuan berlapis (<i>checklist</i> /tanda tangan digital) untuk nominal diatas batas tertentu Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka Pendek)
Pertimbangan Risiko 67% (<i>Low</i>)	Indetifikasi Risiko	Ya	Buat daftar risiko piutang dan diperbarui setiap triwulan berdasarkan laporan pembayaran	Mengintergrasikan daftar risiko ke dalam sistem akuntansi sehingga peringatan otomatis akan muncul untuk piutang yang melewati jatuh tempo. Estimasi waktu: 4 bulan (Jangka menengah)
	Analisis Risiko	Tidak	Membuat from analisis risiko pinjaman per anggota sebelum disetujui.	Menambahkan risk scoring system berbasis poin sebelum memberi persetujuan. Estimasi waktu: 3 bulan (Jangka pendek)
	mitigasi risiko	Ya	Kembangkan SOP penagihan dan pencegahan risiko tidak hanya tindakan hukum	Membuat SOP penagihan digital lengkap dengan template pesan & surat peringatan. Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka pendek)
Kegiatan Pengendalian 100% (<i>Low</i>)	Pemisahan tugas yang layak	Ya	Membuat alur kerja tertulis	Menambahkan perputaran jabatan tahunan agar untuk mencegah kecurangan internal. Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka pendek)
	otoritas yang layak	Ya	Buat dokumen formal SOP otoriasisi dan bukti checklist	Menerapkan otoritas dua pihak secara elektronik.

Komponen	Prinsip	Penilaian	Mitigasi	Rencana Tindak Lanjut
Informasi & Komunikasi 0% (High)	dokumen dan catatan yang layak	Ya	Standarkan seluruh formulir pinjaman dan pelaporan agar konsisten dan terdokumentasi.	Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka pendek) Digitalisasi seluruh dokumen pinjaman ke sistem cloud.
	pengendalian fisik	Ya	Tambahkan backup otomatis untuk softfile di hard drive terpisah.	Estimasi waktu: 4 bulan (Jangka menengah) Menambahkan backup data di server eksternal untuk keamanan.
	pengecekan (pemeriksaan) secara bebas	Ya	Buatkan jadwal audit internal triwulan dan dokumentasi hasil evaluasi.	Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka pendek) Membuat tim audit yang melakukan pengecekan acak setiap bulan.
	sistem informasi akuntansi	Tidak	Gunakan software akuntansi seperti accurate dan beri pelatihan penggunaan.	Estimasi waktu: 1 bulan (Jangka pendek) Membuat modul pelatihan internal accurate.
Monitoring 33% (High)	koperasi menerima informasi yang lengkap terkait kewajiban anggota kepada pihak ketiga	Tidak	Tambahkan from pernyataan jika memiliki utang luar koperasi saat pengajuan pinjaman.	Estimasi waktu: 3 bulan (Jangka pendek) Membuat formulir digital wajib isi sebagai syarat sebagai pernyataan resmi utang luar koperasi.
	apakah anggota koperasi menerima laporan tagihan piutang secara berkala	Tidak	Buatkan sistem notifikasi tagihan bulanan melalui whatsapp/email bagi anggota.	Estimasi waktu: 1 bulan (Jangka pendek) Membuat sistem SMS/WA otomatis berbasis jatuh tempo piutang.
	evaluasi efektivitas pengendalian internal piutang	Tidak	Buat checklist evaluasi bulanan dengan melibatkan bendahara dan pengawas.	Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka pendek) Membuat laporan evaluasi otomatis dari sistem akuntansi.
	hasil evaluasi pengendalian internal digunakan untuk melakukan perbaikan sistem	Ya	Buat laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut setiap akhir triwulan.	Estimasi waktu: 2 bulan (Jangka pendek) Menyusun jadwal evaluasi sistem internal setiap 6 bulan.
	apakah adanya pelaporan atau pengawasan internal atas piutang bermasalah	Tidak	Buat daftar piutang bermasalah dan update statusnya setiap bulan untuk ditindak lanjut.	Estimasi waktu: 6 bulan (Jangka panjang). Membuat dashboard khusus piutang macet dengan filter usia piutang.

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2025

Maka dengan adanya rencana tindak lanjut tersebut pada Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet Garut dapat diartikan bahwa perbaikan pengendalian internal diperlukan sebagai Langkah yang terarah dan terjadwal, dengan fokus pada komponen yang memiliki risiko tinggi seperti lingkungan pengendalian, informasi & komunikasi, serta monitoring. Setiap Tindakan yang direncanakan harus selaras dengan mitigasi risiko yang sudah dibuat dan dikembangkan agar lebih efektif. Penetapan jangka waktu membantu memastikan setiap program dapat diimplementasikan secara bertahap dan terukur, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan potensi piutang tak tertagih dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan koperasi.

Selain itu pendekatan preventif yang dapat diterapkan adalah prinsip *Know Your Customer* (KYC), konsep tersebut memang berasal dari sektor perbankan, tetapi prinsip dasarnya sangat relevan dan dapat diadaptasi dalam Koperasi Simpan Pinjam. KYC bertujuan untuk mengenali anggota secara lebih mendalam sebelum memutuskan pemberian pinjaman, sehingga risiko gagal bayar dapat diidentifikasi lebih awal. Adapun penerapan prinsip KYC dalam koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Customer Identity Program (CIP)

Pada tahap ini, koperasi wajib mengumpulkan dan memverifikasi dokumen identitas anggota seperti KTP, Slip Gaji dan Kartu Keluarga. Berdasarkan temuan pada prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan koperasi, proses pengumpulan data ini telah dilakukan dengan baik. Namun, ketika proses verifikasi masih perlu diperkuat, misalnya dengan menambahkan form pernyataan pinjaman luar koperasi untuk mengetahui potensi beban keuangan anggota secara keseluruhan.

2. *Customer Due Diligence (CDD)*

Proses ini melibatkan analisis kelayakan pinjaman berdasarkan profil risiko anggota. Dalam proses ini, Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet Garut belum sepenuhnya menjalankan analisis risiko secara formal sebelum pinjaman disetujui. Wawancara memang dilakukan, tetapi lebih bersifat informatif, belum sistematis untuk mengukur risiko gagal bayar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan form analisis risiko anggota yang digunakan secara konsisten sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman.

3. *Enhanced Due Diligence (EDD)*

Proses ini sangat penting bagi anggota dengan profil risiko tinggi, seperti anggota yang memiliki pinjaman di luar koperasi atau pernah menunggak. Koperasi perlu menyusun daftar anggota berisiko dan memperbaruinya secara berkala. Hal ini sejalan dengan prinsip evaluasi berkala dalam komponen khususnya dalam komponen monitoring dan penilaian risiko. Selain itu, pemberian pinjaman lanjutan (*top-up*) perlu melalui proses EDD terlebih dahulu.

Dengan menerapkan prinsip – prinsip KYC tersebut dalam praktik operasional koperasi, maka upaya pencegahan terhadap piutang tak tertagih dapat lebih terstruktur dan efektif. Prinsip ini juga sejalan dengan komponen COSO, terutama membantu pada komponen pertimbangan risiko seperti analisis risiko, identifikasi risiko dan mitigasi risiko.

Adapun langkah korektif yang bisa dilakukan oleh koperasi sebagai tindak lanjut jika langkah preventif masih belum bisa menekan piutang yang gagal tertagih karena kondisi di luar kendali koperasi. Metode penghapusan piutang yang dijelaskan oleh Baridwan ada dua metode yang dapat diterapkan oleh Koperasi Pegawai RSUD dr Slamet Garut yaitu metode penghapusan langsung (*Direct Method*), yang cocok untuk skala kecil seperti koperasi simpan pinjam atau metode Cadangan (*Allowance Method*), yang menyiapkan estimasi kerugian piutang terlebih dahulu. Berdasarkan hasil temuan, koperasi belum memiliki sistem atau kebijakan formal untuk penghapusan piutang, sehingga potensi piutang bermasalah terus membebani laporan keuangan dan merusak kualitas aset.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengendalian internal piutang dalam mengurangi risiko piutang tak tertagih pada Koperasi Pegawai RSUD dr. Slamet Garut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan belum optimal, tercermin dari skor COSO sebesar 47% yang menunjukkan kategori risiko tinggi. Proses pemberian pinjaman masih memiliki kelemahan, khususnya dalam aspek verifikasi dan observasi calon peminjam. Penyebab utama piutang tak tertagih berkaitan erat dengan lemahnya penerapan komponen COSO, terutama pada aspek lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring.

Penerapan kerangka COSO dinilai relevan untuk koperasi simpan pinjam, namun perlu penyesuaian dengan kondisi organisasi. Upaya preventif seperti penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), penggunaan formulir analisis risiko, serta peningkatan dokumentasi dan monitoring, sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko piutang bermasalah. Sementara itu, tindakan korektif seperti penghapusan piutang dengan metode langsung atau cadangan dapat diterapkan sesuai kondisi piutang.

Untuk pengembangan selanjutnya, koperasi disarankan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal secara menyeluruh, termasuk pembaruan SOP, peningkatan pelatihan, penggunaan sistem informasi akuntansi, serta pelaksanaan evaluasi berkala terhadap piutang. Selain itu, penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas sumber data dan melakukan pendekatan kualitatif lebih dalam untuk memperkuat temuan.

DAFTAR PUSTAKA

Agha, R. Z., & Fitria, W. (2024). Penyusunan Tindakan Perbaikan Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) JRX. *Ekonomi & Bisnis*, 23(2), 174–183. <https://doi.org/10.32722/eb.v23i2.7105>

- Istanti, A., Dince, M. N., Darius, Y., Rangga, P., & Nipa, U. N. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Anggota Pada Koperasi Kredit Union Bahtera Sejahtera Maumere. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 3(1), 149–165.
- Kemenkop & UKM RI. (2024). *Pertumbuhan Koperasi*. Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
- Lara, R. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada PT . Bestari Buana Murni Cabang Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 289–300. <https://doi.org/10.24014/ekl.v2i2.25425>
- McNally, J. S. (2013). *Kerangka Kerja COSO & Tahun 2013*.
- Naibaho, E., Supitriyani, Manurung, S., & Ervina, N. (2019). Pengendalian Intern Piutang Untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih Kp-Ri Jaya Dinas P Dan K Kabupaten Simalungun. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 11–21. <https://doi.org/10.37403/financial.v5i2.106>
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi* (Edisi Kedu). Erlangga.
- Sanapati, T. A. (2022). Analisis Penerapan Penegendalian Intern Piutang Usaha Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada Koperasi Simpan Pinjam Mekarjaya Kawangkoan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 993–1002.
- Sigar, R. J. K., Tampi, D. L., & Tamengkel, L. F. (2018). Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Manado. *JURNAL ADMINISTRASI BISNIS*, 7(1), 24–32. <https://doi.org/10.35797/jab.v7.i001.24-32>
- Singal, C. R., & Z.Tirayoh, V. (2015). Analisis Pengendalian Interna Piutang Usaha Pada Developer Grand Kawanua International City. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 286–296. <https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7088>
- Taroreh, J. R., Warogan, J. D. ., & Runtu, T. (2016). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal piutang pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 125–134. <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13659>
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57.